



KULIAH KEBIJAKAN KEHUTANAN

KEBIJAKAN PUBLIK #6

Oleh Markum

MATERI KULIAH

01

PENGERTIAN

02

UNSUR-UNSUR

05

FAKTOR-FAKTOR

03

BENTUK-
BENTUK

04

TAHAPAN

06

PENUTUP

PENGERTIAN

01

Mendefinisikan beberapa pengertian tentang kebijakan publik

PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK

1. Kebijakan Publik adalah suatu proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan yang berdampak pada masyarakat luas
2. Aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya
3. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

2. UNSUR-UNSUR KEBIJAKAN PUBLIK

Unsur-unsur kebijakan publik menyangkut tujuan, sifat dan landasan, mengapa kebijakan publik tersebut diperlukan

UNSUR-UNSUR KEBIJAKAN PUBLIK

01

Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu

02

Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pemerintah.

03

Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan

04

Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan tertentu) dan bersifat negatif (keputusan untuk tidak melakukan sesuatu).

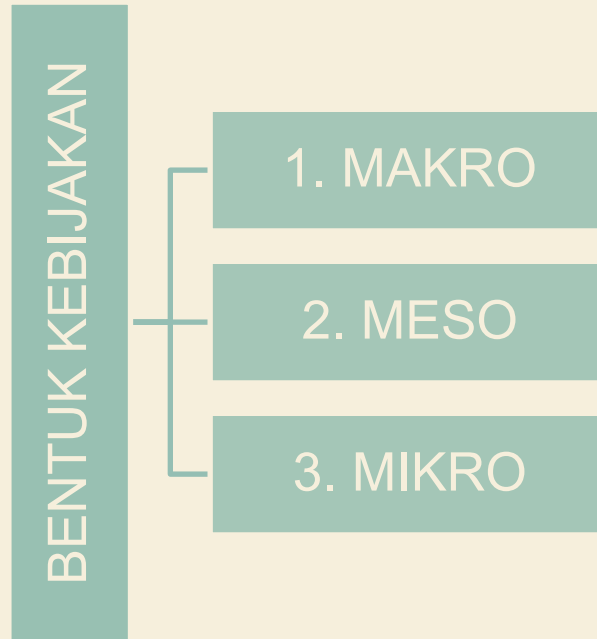
05

Kebijakan publik, selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu

06

Kebijakan publik bersifat mengikat atau memaksa

03. BENTUK-BENTUK KEBIJAKAN PUBLIK



KEBIJAKAN PUBLIK MAKRO



Contoh

(a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (b). Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (c). Peraturan Pemerintah; (d). Peraturan Presiden; (e) Peraturan Daerah.



Pengertian

Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau dapat juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar.

KEBIJAKAN PUBLIK MESO



Pengertian

Kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bersifat menengah atau yang lebih dikenal dengan penjabar pelaksanaan



Contoh

Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Wali kota, Keputusan Bersama atau SKB antar- Menteri, Gubernur dan Bupati atau Wali kota.



KEBIJAKAN PUBLIK MIKRO

Kebijakan publik yang bersifat mikro, mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik yang di atasnya

Pengertian

Peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali kota.

Contoh

04. TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK



1. Penyusunan Agenda

1. Ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan,
2. Menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah (masalah kebijakan)
3. Penyusunan agenda kebijakan dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.
4. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

2. Formulasi Kebijakan

1. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.
2. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
3. Dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah

3. Legitimasi Kebijakan

1. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan.
2. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah

4. Implementasi Kebijakan

1. Adalah sebuah aktivitas, bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan
2. Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut.
3. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

5. Evaluasi Kebijakan

1. Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.
2. Eevaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.
3. Evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

05. FAKTOR-FAKTOR BERPENGARUH PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK

01

Faktor Politik

02

Faktor Ekonomi

03

Faktor Administratif

04

Faktor Teknologi

05

Faktor Sosbud

06

Faktor Pertahanan dan
Keamanan

06. PENUTUP



01

Perumusan Kebijakan publik adalah suatu proses yang memerlukan pendekatan multidisiplin ilmu yang terkait dengan situasi dan masalah kebijakan yang muncul.



02

Beberapa pendekatan yang diperlukan antara lain: ilmu politik, filsafat, ekonomi, sosiologi, pemahaman tentang sejarah, hukum, antropologi-geografi

TERIMA KASIH

Info personal

Email: markum.exp@unram.ac.id

Website: markumgitu.com

Phone: 087865740044



CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, including icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**